

BAB V

PENUTUP

5. 1 Kesimpulan

Pembangunan merupakan upaya untuk memperbaiki struktur dasar masyarakat ke arah yang lebih baik, meliputi berbagai aspek seperti infrastruktur fisik (seperti jalan, jembatan, dan bangunan), pengembangan sumber daya manusia (melalui pendidikan dan pelatihan), pembangunan ekonomi (melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan), serta peningkatan kesejahteraan sosial (melalui pelayanan kesehatan, perumahan yang layak, dan program sosial lainnya). Pembangunan yang berhasil dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat, meningkatkan taraf hidup, dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Realitas pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Manggarai Barat, masih menjadi masalah yang serius untuk dihadapi. Isu-isu terkait pembangunan selalu menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten ini. Namun, yang memprihatinkan adalah kurangnya partisipasi yang jelas dari pemerintah terhadap situasi ini. Ketiadaan perhatian ini sering diabaikan, yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan dalam suatu daerah. Secara umum, pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur, masih belum sepenuhnya mendapatkan perhatian merata di Indonesia.

Infrastruktur di Manggarai Barat saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Berdasarkan data, kondisi ini merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Berbagai aspek infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi di Manggarai Barat, menunjukkan keadaan yang sangat memprihatinkan. Keempat aspek tersebut belum tertata dengan baik, menciptakan kesenjangan yang signifikan antara pemerintah dan masyarakat, serta menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan akses fasilitas publik.

Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah terhadap pembangunan sebagai suatu prioritas daerah. Dengan adanya partisipasi yang lebih aktif dan efektif dari pemerintah, diharapkan pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Langkah-langkah konkret seperti

alokasi anggaran yang tepat, perencanaan yang terukur, dan pelaksanaan yang transparan dapat membantu mengatasi tantangan pembangunan yang masih terjadi di daerah ini.

Kondisi krisis pembangunan infrastruktur di Manggarai Barat jelas bertentangan dengan prinsip hidup bersama yang adil, seperti yang dipertimbangkan oleh filsuf John Rawls. John Rawls menekankan pentingnya prinsip kebebasan dan persamaan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan menyusun kebijakan. Dalam konteks ini, pemerintah Manggarai Barat perlu memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dalam upaya meningkatkan kondisi infrastruktur dan mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat.

Dengan memperkuat infrastruktur yang merata dan menyediakan akses yang adil bagi semua warga, pemerintah dapat mewujudkan prinsip kebebasan dan persamaan yang diadvokasi oleh John Rawls. Langkah-langkah seperti alokasi anggaran yang adil, perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh penduduk Manggarai Barat. Dengan demikian, pemerintah dapat memenuhi tugasnya untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara.

Pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan sangat vital bagi masyarakat Manggarai Barat. Dalam pandangan masyarakat saat ini, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah dapat memberikan manfaat besar, memastikan bahwa setiap daerah tidak terabaikan dari kemajuan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, harapannya adalah agar pembangunan, terutama dalam sektor infrastruktur, dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah serius dalam menangani hal ini, mencegah terjadinya ketidakadilan dalam konteks pembangunan infrastruktur di Manggarai Barat.

Kebijakan pembangunan infrastruktur dari pemerintah harus memberikan prioritas kepada wilayah-wilayah yang sebelumnya belum merasakan dampak positif dari pembangunan infrastruktur. Hal ini diperlukan untuk mencapai tingkat keadilan di tengah masyarakat Manggarai Barat. Prioritas ini harus didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap kebutuhan dan potensi setiap wilayah, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dialokasikan dengan efektif untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur yang ada.

Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk tetap teguh dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu dalam pemerintahan, yang dapat membawa dampak ketidakadilan dalam masyarakat. Keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan pembangunan harus ditegakkan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan seluruh masyarakat Manggarai Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya, penulis mengusulkan beberapa saran untuk mengatasi masalah infrastruktur di Manggarai Barat. *Pertama*, pemerintah. Pemerintah daerah perlu mengembangkan perencanaan infrastruktur yang terpadu dan komprehensif untuk memastikan bahwa semua aspek infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi, dikelola secara efisien dan efektif. Kebijakan pembangunan infrastruktur dari pemerintah harus memberikan prioritas kepada wilayah-wilayah yang sebelumnya belum merasakan dampak positif dari pembangunan infrastruktur.

Hal ini diperlukan untuk mencapai tingkat keadilan di tengah masyarakat Manggarai Barat. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk tetap teguh dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu dalam pemerintahan, yang dapat membawa dampak ketidakadilan dalam masyarakat. Harapannya adalah agar pemerintah Manggarai Barat dapat memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, bagi masyarakat. Masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan infrastruktur dengan memberikan masukan, umpan balik, dan dukungan kepada pemerintah daerah. Partisipasi aktif ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menghadiri pertemuan komunitas yang diadakan oleh pemerintah daerah, berpartisipasi dalam forum diskusi terkait pembangunan infrastruktur, atau melalui mekanisme partisipasi publik lainnya yang disediakan oleh pemerintah setempat.

Dengan memberikan masukan dan umpan balik secara konstruktif, masyarakat dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga penting untuk

meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur, karena adanya keterlibatan dan pengawasan dari berbagai pihak dapat meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui partisipasi aktif dalam proses pembangunan infrastruktur, masyarakat dapat menjadi mitra yang berharga bagi pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan.

Ketiga, bagi institusi seperti Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, penting untuk menjadi wadah yang selalu siap untuk mengkritisi situasi sosial masyarakat yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Saat ini, masyarakat masih terjebak dalam dominasi kepentingan elit politik, sehingga mereka seringkali hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi pemerintah. Sebaliknya, lembaga seperti Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero harus aktif dalam menyuarakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menjadi penjaga keadilan sosial.

Diamnya lembaga dalam situasi ini hanya akan memperburuk kondisi masyarakat dan membawa mereka mengalami degradasi dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, institusi ini perlu menjalankan peran kritisnya dengan memberikan pemahaman filosofis dan kreatif yang mendorong kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Selain itu, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero dapat mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, penelitian, dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu sosial yang penting, serta memberikan wadah bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, lembaga ini dapat menjadi agen perubahan yang berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Dokumen

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur”, dalam JDIH Kementerian Keuangan, *Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. Bogor: Sekretariat Presiden, 2015.

II. Buku

Baghi, Feliks. *Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.

------. Baghi Feliks (ed.) Terj. Yosef Maria Florisan dan Alex Armanjaya, *Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledaleo, 2009.

Bahua, Mohammad Iqbal. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.

Daniels, N. *Membaca Rawls: Studi Kritis tentang Teori Keadilan Rawls*. New York: Buku Dasar, 1975.

Dirga Ardiansa, dkk. *Transaksi Politik Warga: Mendorong Partisipasi Politik Warga dalam Pemilu dan Perencanaan Pembangunan*. Depok: Cakra Wikara Indonesia, 2018.

Dr. A. Rahman HI, M.Si., CICS. *Komunikasi Persuasi Politik*. Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2019.

Dwijosaputro, Pengantar Genetika (Yogyakarta: PT. Bhatara Karya Aksara, 1981). *Pengantar Genetika*. Yogyakarta: PT. Bhatara Karya Aksara, 1981.

Fauzan, John Rawls. Terj. Uzair. *A Theory of Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

------. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Gaduh, Arya. *Kapasitas Desa dalam Memelihara Infrastruktur: Bukti dari Pedesaan Indonesia*. Jakarta: Bank Dunia, 2010.

Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.

Ivan Ramadhan, SST, Addiena Noorfirdausi Sabilla Setiadi, S.Tr.Stat, dan Elisa Imania, S.Tr.Stat. *Kabupaten Manggarai Barat dalam Angka 2023*. Labuan Bajo: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2023.

Kleden, Paul Budi. *Di Tebing Waktu*. Maumere: Ledalero, 2009.

Kodoatie, Robert J. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Kosch, Thomas Pogge and Michelle. *John Rawls: His Life and Theory of Justice*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad ke-21*. Yogyakarta: Penerbit Yrama Widya, 2020.
- Lovett, Frank. *Rawls's A Theory of Justice*. New York: Coninum Internaional Publishing, 2011.
- M. R. Khairul Muluk, ed. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Indonesia*. Malang: UB Press, 2013.
- Madung, Otto Gusti. *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- . *Jurgen Habermas & John Rawls*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Marcus Colchester dan Sophie Chao. ed. *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*. Jakarta: Epistema Institut, 2021.
- McMahon, Christopher. *Reasonableness and Fairness: A Historical Theory*. New York: Cambridge University Press, 2016.
- Mongko, Silvianus M. *Demokrasi Minus Diskursus*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Nandang Isnandar, S.SIT, MT dan Ir. Hadi Arnowo, MAppSc. *Prinsip dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. Banyumas: SIP Publising, 2021.
- Nanto, Rio. *Politik Era Milenial Butir-butir Esai Politik Populer*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2020.
- Nozick, Robert. *Anarchy, State, and Utopia*. Oxford: Blackwell, 1974.
- Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH, Msi, dkk.,. *Mengajarkan Hukum Yang Berkeadilan*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource, 2009.
- Proto, Neil Thomas. *To A High Court: Five Bold Law Students Challenge Corporate Greed and Change the Law*. FriesenPress, 2023.
- Rahayu, dkk. *Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran di Indonesia*. Yogyakarta: PR2Media, 2015.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. New York: Harvard University Press, 1971.

Sunandar, Jason Brenan. Terj. Nanang. *Filsafat Politik*. Jakarta Selatan: Friedrich Nauman Foundation Indonesia, 2016.

Todaro, Mikael P. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Utama, 2000.

Wahyudi, Will Kymlicka. Terj. Agus. *Pengantar Kontemporer Kajian Khusus Atas Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Williamslm, Bernard. *Morality: An Introduction to Ethics*. New York: Cambridge Press, 1972.

III. Jurnal dan Manuskrip

Antle, John M. "Human Capital, Infrastructure, and the Productivity of Indian Rice Farms." *Journal of Development Economic* 14:2, Januari 1984

Abbas, Aatif. "Rawls's Egalitarianism." *Jornal Contemporary Political Theory* 21:10, September 2022.

Begović, Boris. "The Aristocracy of Talent: How Meritocracy Made the Modern World by Adrian Wooldridge." *Panoeconomicus* 70:4, September 2023.

Buchak, Lara. "Taking risks behind the veil of ignorance." *Ethics* 127:3, April 2017.

Butcher, Tom. "Human Rights, Trans Rights, Prisoners' Rights: An International Comparison", *Northwestern Journal of Law and Social Policy*, 18:2, April 2023.

Chang-Hee Kim, and Yong-Beom Choi. "How meritocracy is defined today?: Contemporary aspects of meritocracy." *Economics & Sociology* 10:1, Desember 2017.

Cohen, Joshua. "The Importance of Philosophy: Reflections on John Rawls", *South African Journal of Philosophy*, 23:2, Maret 2015.

Deity Yuningsih, dkk. "Penerapan Asas Keadilan terhadap Penetapan Limit pada Proses Pelelangan Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Kendari." *Jurnal Universitas Halu Oleo* 4:2, Agustus 2022.

Djalante, Adris A. Putra & Susanti. "Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Media Engineering* 6.1 (2016).

Fattah, Damanhuri. "Teori keadil an menurut john rawls." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9:2, Desember 2013.

Hanipah, Aulia Dini, Titan Nurul Amalia, and Dede Indra Setiabudi. "Urgensi Lingkungan Belajar Yang Kondusif Dalam Mendorong Siswa Belajar Aktif." *Education: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2:1, Maret 2022.

- Izudin, Ahmad. "Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 4:3, April 2019.
- K., I. Ngah Zanudin, and S. H. Misnan. "Evaluating community participation in planning decision-making in Iskandar Malaysia: Thematic analysis of public planner's perception." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 385.1 (n.d.).
- Koten, Yosef Keladu, "Menelaah Prinsip-prinsip Etis di Balik Tindakan Negara", dalam Yosef Keladu Koten dan Otto Gusti Madung, ed. *Menalar Keadilan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2022.
- Kustiawan, Winda, et al. "Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Infrastruktur Nasional di Era Digital." *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 5:2, July 2023.
- Lie, Jon Harald Sande. "The humanitarian-development nexus: humanitarian principles, practice, and pragmatics." *Journal of International Humanitarian Action* 5:1, Desember 2020.
- Lovina, Ronaldy. "Kajian Pembangunan Infrastruktur (Jalan, Jaringan Listrik, Telekomunikasi) Yang Disinergikan Dengan Pembangunan Jalur Hijau Di Kota Tanjungpinang." *Jurnal Archipelago* 2:2, Desember 2023.
- Madung, Otto Gusti Ndegong. "Konsep Liberalisme Politik John Rawls sebagai Jawaban terhadap Tantangan Masyarakat Plural dan Kritik atasnya." *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi STF Driyarkara* 18:2, Oktober 2022.
- ."Teori Keadilan Distributif John Rawls, Kritik dan Relevansinya", dalam Yosef Keladu Koten dan Otto Gusti Madung, ed. *Menalar Keadilan*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2022.
- Maurya, Sooraj Kumar. "On just, justice and distributive justice: a critical and comparative discourse." *Journal of Liberty and International Affairs* 8:2, Juni 2022.
- Noor, Triana Rosalina. "Evaluasi Desain Infrastruktur Pendidikan Ramah Anak." *International Muktamar for Arabic Language and Islamic Studies* 2:1, Januari 2023.
- Persada, Citra "Model Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)". Disertasi, Institut Pertanian Bogor, 2015.
- Posumah, Ferdy. "Penengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15:2, Februari 2015.

- Purnomo, Sodik Dwi, Minadi Wijaya, and Heri Setiawan. "Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Majalah Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 18:1, Mei 2021.
- Putra, Adris A. & Susanti Djalante, "Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 6:1, Januari 2016.
- Resti Nur Arini, dkk. "Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Kampung Baragajed dan Kampung Pasir Salam." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1:1, Juni 2021.
- Setiawan, Fauzi Budi. "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan poros desa di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 8:3, September 2012.
- Siti Ummu Adillah, and Sri Anik. "Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan." *Yustisia* 4:3, Desember 2015.
- Smith, Paul. "Incentives and justice: GA Cohen's egalitarian critique of Rawls." *Social Theory and Practice* 24:2, Maret 1998.
- Sugiarto, Agus, and Dyah Mutiarin. "Konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran daerah." *Journal of Governance and Public Policy* 4:1, February 2017.
- Suheri, Ana. "Wujud Keadilan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Morality* 4:1, Juni 2018.
- Sukartini, Ni Made, and Samsubar Saleh. "Akses Air Bersih di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 9:2, Agustus 2016.
- Suswita, Intan, Darwin Damanik, and Pawan Darasa Panjaitan. "Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun." *Jurnal Ekuilnomi* 2:1, Juni 2020.
- U'un Ainul Yaqin, Titik Herwanti, dan Akram. "Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 25:3 Desember 2018.
- Widianto, Adita Taufik. "Study Of Egalitarianism In The Social Life Of The Osing Community In Banyuwangi: Aspects Of Welfare, Justice And Equality." *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora* 7:2, Agustus 2023.
- Zanudin, K, I. Ngah, dan S.H Misnan, "Evaluating Community Participation in Planning Decision Making Iskandar Malaysia: Thematic Analysis of Public Planner's Perception", *Journal University Teknologi Malaysia*, 385:1 November 2019.

IV. Internet

- Admin Stih Adhyaksa, “Justice as Fairness: Konsep Teori Keadilan John Rawls”, stih-adhyaksa.ac.id September 2023, <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/>.
- Chris Heathcote, “Tantangan Besar Indonesia: Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik, dan Air”, dalam *Warta Ekonomi. Co. id* 09 Januari 2018, <https://wartaekonomi.co.id/read166790/tantangan-besar-indonesia-pembangunan-infrastruktur-jalan-listrik-dan-air>.
- Gerasimos Satria, “Pemkab Manggarai Barat Diminta Perhatikan Jalan Rusak”, *VictoryNews.id* 28 April 2023 <https://mabar.victorynews.id/manggarai-barat/pr-3393318960/pemkabmanggarai-barat-diminta-perhatikan-jalan-rusak>.
- Kondisi SDN Wae Mege Memprihatinkan”, dalam *VictoryNews.id* 24 Agustus 2022, <https://mabar.victorynews.id/humaniora/pr-3394287727/gedung-sekolah-dasar-memprihatinkan>.
- 4 Kecamatan Belum Terjangkau Sinyal Seluler”, dalam *VictoryNews.id* 25 Agustus 2022 <https://mabar.victorynews.id/humaniora/pr-3394287727/kecamatan-belum-terjangkau-sinya-seluler>.
- Herry Kabut, “Ironi Manggarai Barat: di Labuan Bajo Pembangunan Infrastrukturnya Masif, di Pedalaman Warga Masih Harus ‘Mengemis’ agar Punya Jalan”, *Floresa.com* 11 November 2023 <https://floresa.co/reportase/mendalam/57644/2023/11/11/ironi-manggarai-barat-di-labuan-bajo-pembangunan-infrastrukturnya-masif-di-pedalaman-warga-masih-harus-mengemis-agar-punya-jalan>.
- “Panjang Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat (km)” portal.manggarai Barat kab.go.id 10 September 2022 <https://portal.manggarai Barat kab.go.id /infrastruktur-jalan>.
- “Sejarah Kabupaten Manggarai Barat” *petantt.com* 06 Juli 2022, <http://petantt.com/kabupaten-manggarai-barat>.

